



Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

Percepat UHC, Pemerintah Tambah Kuota PBI-JK menjadi 96,8 juta jiwa di Tahun 2019

JAKARTA (09/01/2019) – Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa. Penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

"Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage," jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf (08/01).

Iqbal menerangkan, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

"Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar dia.

Sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK. Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda. BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.475 rumah sakit (termasuk klinik utama).

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62 21 424 6063

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Twitter : @BPJSKesehatanRI

Instagram : @bpjskesehatan_ri

Facebook : BPJS Kesehatan

Youtube : BPJS Kesehatan

Kompasiana : BPJS Kesehatan

Kaskus : bpjskesehatan

To Accelerate UHC, the Government Increases PBI-JK Quota to 96.8 million in 2019

JAKARTA (09/01/2019) – The government increased the quota of Recipients of Health Insurance Contribution Assistance (PBI-JK) borne by the State Budget in 2019 to 96.8 million from the previous 92.4 million. The addition of this quota is a manifestation of the government's strong commitment to the National Health Insurance Program – Indonesia Healthy Card (JKN-KIS) especially in increasing the coverage of participation.

"There were 4.4 million additions from previous years (2016-2018). It's good news. We hope that the addition of the PBI quota will accelerate the realization of universal health coverage," explained Head of BPJS Kesehatan Public Relations, Iqbal Anas Ma'ruf (08/01).

Iqbal explained that the addition of the PBI-JK quota was based on the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 01/HUK/2019 concerning the Stipulation of Receiving Health Insurance Contribution in 2019 signed by the Social Minister of the Republic of Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. This data includes the babies from PBI-JK participants registered in 2019.

"To ensure the participants who are PBI-JK are truly entitled and fulfill the qualifications set by the government, data updating is routinely carried out by the Ministry of Social Affairs in collaboration with BPJS Kesehatan and Ministry of Home Affairs, in this case, the Population and Civil Registry Service (Dukcapil) both at the central and regional levels," he said.

Throughout 2018, the verification and validation process was conducted by the Ministry of Social Affairs according to the applicable regulations and matching with population data so that there was a NIK(ID number)-based PBI data information system. There are several things that are verified and validated regularly. For example, the elimination of PBI-JK participants who became Wage Recipient Workers (PPU), die or have multiple NIKs. Every month, BPJS Kesehatan reports to the Ministry of Health with copies of the Ministry of Social Affairs. Furthermore, if it has been coordinated across institutions, BPJS Kesehatan will accept the changes to the PBI-JK for renewal.

Until January 3, 2019, there are 215,860,046 citizens of Indonesia who have become JKN-KIS participants. BPJS Kesehatan also cooperates with 23,011 First Level Health Facilities (FKTP), 2,475 hospitals (including major clinics).

For more information, contact:
BPJS Kesehatan Public Relations
BPJS Kesehatan Headquarters
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id
Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Twitter : @BPJSKesehatanRI
Instagram : @bpjskesehatan_ri
Facebook : BPJS Kesehatan
Youtube : BPJS Kesehatan
Kompasiana : BPJS Kesehatan
Kaskus : bpjskesehatan